

ANALISIS DINAMIKA KEMISKINAN DI NUSA

TENGGARA TIMUR : STUDI KASUS FLORES

Yuspita Andini¹, St. Yulaiha², Zulfikar Nilhak³, Dayatil Fajriansyah⁴, Mishan Joni⁵,
Khairunnisyah khairunisyah⁶, Ainun Rabiah⁷, Muhammad Ahlul Khadratun⁸, Inang Sri Imara⁹, Tiara
Tiara¹⁰, Rena Zarwini¹¹, Inka Nusamuda Pratama¹²

123456789101112 Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik

Universitas Muhammadiyah Mataram

yuspitaandini123@gmail.com

Keywords:

PovertyDynamics,
Flores Island, East Nusa
Tenggara (NTT)

Abstract:

This research aims to analyze the dynamics of poverty on the island of Flores, which is part of the East Nusa Tenggara (NTT) Province, Indonesia. Utilizing a case study approach, this research explores the contributing factors to the high level of poverty on this island. A literature review will be conducted to understand the socio-economic context of Flores and relevant theoretical frameworks for poverty analysis. Both primary and secondary data will be collected to provide a deeper understanding of the poverty conditions in Flores. Data analysis will be conducted to identify patterns and trends in poverty dynamics as well as influencing factors. The findings of this research are expected to provide better insights into the issue of poverty on the island of Flores and serve as a basis for formulating more effective policies to address poverty in the region.

Kata Kunci:

Dinamika Kemiskinan,
Flores NTT, Analisis
Literatur

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kemiskinan di Pulau Flores, yang merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan di pulau ini. Tinjauan literatur akan dilakukan untuk memahami konteks sosial-ekonomi Flores dan kerangka teoretis yang relevan untuk analisis kemiskinan. Data primer dan sekunder akan dikumpulkan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kondisi kemiskinan di Flores. Analisis data akan dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola dan tren dalam dinamika kemiskinan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang masalah kemiskinan di Pulau Flores dan menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan di wilayah tersebut.

Article History:

Received: 30-05-2024

Online : 22-06-2024



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah sebuah pulau yang kaya akan budaya yang beragam, sejarah yang kaya, dan keindahan alam yang menakjubkan. Flores merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu, kehidupan masyarakat Flores yang masih sangat terikat dengan tradisi lokal memberikan gambaran yang menarik tentang kekayaan budaya NTT. Dari rumah adat yang khas hingga upacara adat yang meriah, Flores adalah destinasi yang tak terlupakan bagi mereka yang ingin menjelajahi keajaiban budaya dan alam Indonesia Timur. Di antara keindahan alam dan kekayaan budaya, namun Flores juga menghadapi tantangan yang signifikan dalam bentuk tingginya tingkat kemiskinan. Meskipun memiliki potensi yang besar, masalah kemiskinan tetap menjadi salah satu isu yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Flores secara serius.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sering kali terkait dengan masalah kemiskinan yang kompleks. Kondisi alam yang berupa tanah bebatuan, kering, dan minim sumber air, serta tingkat pendidikan rendah, kesehatan masyarakat yang buruk, dan tingginya angka stunting, kematian ibu dan bayi, serta tingkat korupsi yang tinggi, menjadi ciri khas yang melekat pada provinsi kepulauan ini. Oleh karena itu, NTT sering disebut sebagai provinsi "Nasib Tidak Tentu" atau "Nanti Tuhan Tolong", mencerminkan realitas yang penuh dengan masalah kronis dan klasik. Ungkapan tersebut menggambarkan keadaan yang sulit dihadapi oleh penduduk NTT, yang membuat provinsi ini menempati peringkat ketiga dari bawah dalam hal kemiskinan nasional, setelah Papua dan Papua Barat. Roen (Roen et al., 2024)

Kemiskinan merupakan hal yang melibatkan beragam faktor yang saling terkait, menciptakan masalah yang kompleks. Tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dasar, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial-budaya yang memengaruhi akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, norma sosial, dan peluang dalam masyarakat. (Pratama, 2023)

Secara umum, permasalahan kemiskinan terus menjadi fokus penelitian yang relevan. Tidak hanya karena masalah tersebut telah ada sejak lama dan masih menjadi kenyataan dalam masyarakat, tetapi juga karena gejalanya semakin meruncing seiring dengan berbagai krisis multidimensional yang dihadapi oleh Indonesia (Hendayani, 2023). Meskipun kemiskinan bersifat personal, namun penanggulangannya bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan juga menjadi sorotan bagi semua pihak terkait untuk menghadapi tantangan besar ini. Melati & Zulkarnain (dalam Fardi et al. 2023)

Selain itu, dimensi politik juga memainkan peran penting karena ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan politik dapat memperburuk kemiskinan dengan menghasilkan kebijakan yang tidak efektif dalam mengatasi masalah ini. Terakhir, kemiskinan juga terkait erat dengan dimensi partisipasi, di mana individu yang hidup dalam kemiskinan sering menghadapi keterbatasan dalam partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka (Prayoga et al., 2023). Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan secara efektif, dibutuhkan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan semua dimensi ini dalam upaya mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Lalu Suryadi (dalam Pratama 2023)

Kemiskinan tidak hanya terkait dengan keterbatasan finansial semata. Ini juga melibatkan akses terhadap pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang memadai, tempat tinggal yang layak, dan pekerjaan yang stabil. (Nurulita et al., 2023) Kemiskinan tetap menjadi tantangan yang belum teratasi sepenuhnya, terutama di negara-negara berkembang, menunjukkan bahwa

masalah ini masih menjadi perhatian global. Di Indonesia, kemiskinan telah menjadi salah satu masalah utama sejak dulu. Kemiskinan dapat dijelaskan sebagai kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat, baik pria maupun wanita, mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. (Akbar & Arifin, 2023)

Menurut Sudarwati (2009:17), terdapat beberapa ciri umum kemiskinan, termasuk: (1) Keluarga dengan jumlah anak yang banyak, di mana kepala rumah tangganya seringkali bekerja sebagai pekerja rumah tangga; (2) Tingkat pendidikan yang rendah baik bagi kepala rumah tangga maupun anggota keluarga lainnya; (3) Pekerjaan yang tidak stabil dan bervariasi, seringkali menerima pekerjaan kasar yang ditawarkan; (4) Sumber pendapatan utama berasal dari sektor pertanian; (5) Konsumsi gizi yang tidak mencukupi kualitasnya. Secara singkat, konsep dan pengukuran kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena melibatkan banyak faktor yang berperan, sehingga penentuan dan pemahaman akar persoalan kemiskinan memerlukan pendekatan yang beragam dari berbagai pakar disiplin ilmu yang berbeda. (Tokan, 2021)

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*case study approach*) untuk menganalisis dinamika kemiskinan di Pulau Flores, yang merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia. Penelitian ini lebih cenderung menggunakan metode kualitatif. Pendekatan studi kasus seringkali terkait erat dengan penelitian kualitatif yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena tertentu melalui analisis konteks dan faktor-faktor yang kompleks (Irawan et al., 2023). Analisis kemiskinan yang melibatkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kontekstual seringkali lebih cocok dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk memahami nuansa dan kompleksitas situasi yang terlibat (Nadyawati, 2023).

Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks yang alami, melalui pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata, citra, atau suara, serta melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap data tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang dinamika kemiskinan di Pulau Flores, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan berbasis pada pemahaman yang mendalam terhadap kondisi masyarakat setempat (Nurdin, 2023).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keterbatasan dalam hal mencukupi dan kualitas pangan, keterbatasan akses dan rendahnya kualitas layanan kesehatan, keterbatasan akses dan rendahnya kualitas layanan pendidikan, peluang kerja dan usaha yang terbatas, serta keterbatasan akses terhadap layanan perumahan dan sanitasi. Selain itu, kemiskinan juga terkait dengan keterbatasan akses terhadap air bersih, ketidakpastian dalam kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan dan sumber daya alam, serta kelemahan dalam jaminan keamanan dan partisipasi masyarakat, serta beban berat yang ditanggung oleh keluarga karena jumlah tanggungan yang besar. (Triani et al., 2020)

Secara keseluruhan, isu kemiskinan tetap menjadi fokus penting untuk terus diselidiki. Tidak hanya karena kemiskinan telah menjadi masalah yang ada sejak lama dan masih relevan hingga saat ini, tetapi juga karena gejalanya semakin memburuk seiring dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Meskipun kemiskinan berakar pada individu atau perorangan, hal ini tidak berarti bahwa tanggung jawab untuk mengatasi masalah ini hanya ada pada individu tersebut. Sebaliknya, masalah ini harus menjadi perhatian bersama bagi seluruh elemen masyarakat atau pemangku kepentingan untuk menanggulangi permasalahan yang kompleks ini. Melati & Zulkarnain (dalam Fardi et al. 2023)

NTT, yang terletak di timur kepulauan Nusa Tenggara dan memiliki ibu kota di Kota Kupang, menunjukkan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi NTT menempati peringkat ketiga sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia, setelah Provinsi Papua dan Papua Barat, dengan persentase mencapai 20,23% [1]. Secara geografis, Provinsi NTT memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau yang panjang, menyebabkan dampak serius terhadap produksi pangan dan masalah sosial lainnya. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2022, Kabupaten/Kota Sumba Tengah memiliki persentase penduduk miskin tertinggi. Meskipun terjadi penurunan hingga tahun 2021, namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 9,17%, yang kemudian diikuti dengan penurunan kembali sebesar 8,61% [1]. (Kamsina & Khoirudin, 2024)

1) Persentase penduduk kemiskinan menurut Kabupaten atau Kota (persen), 2021-2023

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
Sumba Barat	28.39	27.47	27.17
Sumba Timur	29.68	28.22	28.08
Kupang	22.98	21.70	21.78
Timor Tengah Selatan	26.64	25.45	25.18
Timor Tengah Utara	22.62	21.50	21.85

Belu	15.68	14.84	14.30
Alor	21.09	20.25	19.97
Lembata	26.21	25.18	24.78
Flores Timur	11.14	10.75	11.77
Sikka	13.35	12.61	12.56
Ende	24.13	23.00	22.86
Ngada	12.58	11.93	12.06
Manggarai	20.48	19.84	19.69
Rote Ndao	28.08	27.45	27.05
Manggarai Barat	17.92	17.15	16.82
Sumba Tengah	34.27	32.51	31.78
Sumba Barat Daya	28.18	27.16	27.48
Nagekeo	12.91	12.05	12.33
Manggarai Timur	26.50	25.35	25.06
Sabu Raijua	30.13	28.73	28.37
Malaka	16.33	15.26	14.42
Kota Kupang	9.17	8.61	8.61
Nusa Tenggara Timur	20.99	20.05	19.96

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

2. Faktor Penyebab Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan memiliki beragam faktor penyebab dan dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang. Menurut Darwin, (2005a), terdapat empat faktor yang menyebabkan kemiskinan. Pertama, faktor budaya, yang meliputi kebiasaan hidup dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, seperti sifat malas dan konsumtif, orientasi hidup pragmatis, serta ketergantungan pada kekayaan alam yang melimpah. Darwin juga menyatakan bahwa akar permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh perempuan terletak pada budaya patriarki, di mana laki-laki dianggap superior dan perempuan subordinat. Budaya seperti ini sering kali menghasilkan diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Kedua, faktor struktur sosial berperan dalam kemiskinan karena kebijakan sosial, politik, dan ekonomi negara yang tidak menguntungkan bagi masyarakat tertentu.

Menurut Revrisond (Tokan, 2021), kemiskinan struktural disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi, kolusi, dan sistem ekonomi global yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu. Ketiga, faktor alam juga berperan dalam kemiskinan, seperti kondisi alam yang kering, tandus, serta kurangnya sumber daya alam yang melimpah. Isolasi pemukiman penduduk dan bencana alam juga dapat menjadi penyebab kemiskinan. Keempat, konflik sosial dan politik, termasuk peperangan, menjadi faktor penyebab kemiskinan karena instabilitas sosial dan

politik yang signifikan menghambat upaya masyarakat, terutama perempuan, dalam membuka lapangan usaha dan meningkatkan produktivitasnya.

Secara umum, kemiskinan dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor penyebabnya menjadi tiga jenis: kemiskinan kultural, natural, dan struktural. Kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor budaya seperti kurangnya disiplin, ketidakteraturan, dan boros. Kemiskinan natural terjadi karena faktor-faktor alamiah seperti cacat, penyakit, usia lanjut, dan bencana alam. Sementara itu, kemiskinan struktural disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti distribusi aset produktif yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang tidak adil, praktik korupsi dan kolusi, serta ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu. (Triani et al., 2020)

Oleh karena itu, kebijakan untuk mengatasi kemiskinan harus holistik dan terintegrasi, yang mencakup semua faktor penyebab kemiskinan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan meliputi pertumbuhan ekonomi yang melambat, investasi yang rendah, pendapatan, upah, tingkat pengangguran, inflasi, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, kondisi lingkungan, dan faktor lainnya. Hastin & Siswadhi dalam (Penduduk et al., 2024)

3. Tingkat Pendidikan

Menurut Crow & Crow, pendidikan adalah proses belajar yang memberikan pemahaman, wawasan, dan penyesuaian kepada seseorang sehingga menyebabkan perkembangannya. Sementara Cryns berpendapat bahwa pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh individu yang bertanggung jawab atas pertumbuhan anak untuk membawanya menuju kedewasaan. Pendapat lain dari John Dewey menyatakan bahwa pendidikan adalah proses pembelajaran yang dialami setiap individu dalam menjalani kehidupan, baik secara fisik maupun mental. Syarullah dalam (Penduduk et al., 2024)

Tingkat pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Flores, memainkan peran penting dalam mengatasi masalah kemiskinan. Namun, beberapa tantangan signifikan dalam sektor pendidikan di daerah ini turut berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan hubungan antara pendidikan dan kemiskinan di Flores, NTT:

1. Akses Terbatas ke Pendidikan: Di Flores, banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau, sehingga akses ke sekolah menjadi terbatas. Anak-anak sering kali harus menempuh jarak yang jauh untuk bersekolah, yang dapat mengurangi tingkat kehadiran dan partisipasi siswa. Hal ini menyebabkan banyak anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Kualitas Pendidikan: Kualitas pendidikan di Flores sering kali kurang memadai. Sekolah-sekolah di daerah ini sering kekurangan fasilitas, bahan ajar, dan tenaga pendidik yang berkualitas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya mutu pendidikan yang diterima oleh siswa, sehingga mereka kurang siap untuk menghadapi tantangan di dunia kerja.
3. Kemampuan Ekonomi Keluarga: Banyak keluarga di Flores yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ketidakmampuan ekonomi ini sering kali menyebabkan anak-anak harus membantu orang tua bekerja atau menjaga adik-adik mereka, sehingga pendidikan menjadi prioritas yang lebih rendah. Selain itu, biaya pendidikan, meskipun terjangkau, masih menjadi beban bagi keluarga miskin.
4. Kurangnya Kesadaran Akan Pentingnya Pendidikan: Di beberapa komunitas, kesadaran akan pentingnya pendidikan masih rendah. Banyak orang tua yang tidak menyadari

pentingnya pendidikan untuk masa depan anak-anak mereka, sehingga mereka tidak mendorong anak-anak mereka untuk bersekolah.

5. Dampak Jangka Panjang: Rendahnya tingkat pendidikan di Flores berdampak pada rendahnya peluang kerja yang tersedia bagi penduduk setempat. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan membuat mereka sulit bersaing di pasar kerja, yang pada akhirnya memperpanjang siklus kemiskinan. Tanpa pendidikan yang memadai, generasi muda di Flores tidak memiliki alat yang cukup untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan intervensi yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat setempat. Program-program yang fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta kampanye kesadaran akan pentingnya pendidikan, sangat diperlukan untuk memutus siklus kemiskinan di Flores, NTT.

4. Pengangguran

Permasalahan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya jumlah pengangguran, tingginya angka inflasi, dan rendahnya pertumbuhan ekonomi. Pengangguran merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, dilihat dari tingkat pendapatan yang diperoleh. Ketika tenaga kerja terserap secara penuh (*full employment*), pendapatan masyarakat akan mencapai tingkat maksimum. Tingkat pengangguran di NTT berfluktuasi dari tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,27%, kemudian menurun menjadi 3,01% pada tahun 2018, menunjukkan mulai terserapnya tenaga kerja di wilayah tersebut. Namun, tingkat pengangguran kembali meningkat dalam dua tahun terakhir, mencapai 4,28% pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan PHK berkelanjutan dan ancaman kebangkrutan di berbagai sektor ekonomi. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran mulai menurun menjadi 3,77%, menunjukkan upaya pemerintah yang berhasil mengatasi masalah pengangguran secara bertahap. (Pengangguran et al., 2023)

Menurut Sadono Sukirno (2012:123), Pengangguran adalah situasi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja berharap untuk mendapatkan pekerjaan tetapi belum berhasil melakukannya. Orang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak dianggap sebagai penganggur. Sebagai contoh, seorang ibu rumah tangga yang memilih untuk tidak bekerja karena ingin fokus mengurus keluarganya tidak dianggap sebagai penganggur. Demikian pula dengan seorang anak dari keluarga kaya yang menolak untuk bekerja karena gajinya di bawah ekspektasinya, mereka tidak dianggap sebagai penganggur, tetapi dikenal sebagai pengangguran sukarela. (Penduduk et al., 2024)

Dengan tingkat pengangguran yang masih signifikan di Indonesia, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang mendukung penyerapan tenaga kerja di negara ini. Salah satunya adalah lewat penerapan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang mengharuskan pemerintah untuk mengatasi persoalan pengangguran. (Prihatin & Pratama, 2021)

5. Inflasi

Inflasi adalah peningkatan umum dalam harga-harga yang berlaku dalam suatu ekonomi. Tingkat inflasi bervariasi dari satu periode ke periode lainnya, serta berbeda antara negara yang berbeda. Tingkat inflasi dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 1) inflasi rendah, yang terjadi ketika kenaikan harga berada di bawah 2 atau 3 persen, 2) inflasi moderat, yang terjadi ketika kenaikan harga berada di antara 4 hingga 10 persen, dan 3) inflasi yang serius, yang dapat

mencapai beberapa puluh atau bahkan beberapa ratus persen dalam satu tahun. Amalia dalam (Penduduk et al., 2024)

Inflasi memiliki dampak yang mendalam terhadap kemiskinan, terutama karena kenaikan harga barang dan jasa dasar yang secara langsung mengurangi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Saat inflasi terjadi, harga kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan bahan bakar meningkat, memaksa keluarga miskin mengalokasikan lebih banyak pendapatan mereka untuk kebutuhan dasar ini. Akibatnya, mereka memiliki lebih sedikit dana yang tersedia untuk pendidikan, layanan kesehatan, dan investasi lain yang dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. Kenaikan harga juga dapat membatasi akses terhadap barang-barang penting, memaksa keluarga miskin untuk mengurangi konsumsi atau mencari alternatif yang lebih murah dan mungkin kurang sehat.

Selain itu, inflasi seringkali tidak diiringi oleh kenaikan upah yang memadai, sehingga pendapatan riil (daya beli) dari masyarakat berpenghasilan rendah menurun. Ketika upah tidak naik seiring dengan inflasi, masyarakat miskin mengalami penurunan standar hidup karena pendapatan mereka tidak lagi mencukupi untuk menutupi biaya hidup yang meningkat. Hal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dan memperpanjang siklus kemiskinan. Selain itu, inflasi dapat merusak tabungan yang mungkin dimiliki oleh keluarga miskin, mengikis nilai dari sedikit aset yang mereka miliki, dan membuat mereka lebih rentan terhadap guncangan ekonomi. Semua faktor ini menjadikan inflasi sebagai ancaman serius bagi upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi dari kelompok yang paling rentan dalam masyarakat.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa pulau Flores dihadapkan pada tantangan serius terkait tingkat kemiskinan yang tinggi. Faktor-faktor seperti kondisi alam yang sulit, keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, tingkat pendidikan yang rendah, angka pengangguran yang tinggi, inflasi, serta faktor-faktor budaya dan struktural lainnya berkontribusi terhadap masalah kemiskinan tersebut. Untuk mengatasi kemiskinan di Flores, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja, penanganan inflasi, dan pemberdayaan masyarakat setempat dengan kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan di Flores melalui program-program yang berfokus pada peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta pelatihan bagi tenaga pendidik dan medis untuk mengurangi angka kemiskinan. Selain itu, diperlukan inisiatif untuk mengembangkan sektor ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan pelatihan dan dukungan finansial bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program-program pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi lokal terpenuhi, termasuk penguatan kapasitas komunitas dalam manajemen sumber daya dan peningkatan partisipasi dalam pemerintahan lokal. Pemerintah juga perlu merumuskan kebijakan sosial yang terintegrasi, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan, dengan dukungan data yang akurat dan pendekatan berbasis bukti untuk memastikan efektivitasnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram, atas bimbingan dan fasilitas yang diberikan. Penulis juga berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moral dan semangat selama proses penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi upaya penanggulangan kemiskinan di NTT, khususnya di Pulau Flores.

REFERENSI

- Akbar, R. K., & Arifin, Z. (2023). Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2021. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 7(01), 81–94. <https://doi.org/10.22219/jie.v7i01.23860>
- Fardi, M., Inka Nusamuda Pratama, Darmansyah, & Amil. (2023). Transparansi Pendataan Program Bantuan Sosial Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pegesangan Kota Mataram. *Journal of Social and Policy Issues*, 3, 150–155. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.209>
- Hendayani, B. (2023). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS IT DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 1(1), 75–83. <https://journaldetubuya.com/index.php/jid/article/view/59/19>
- Irawan, M. F., Putra, M. A. R., Marsanda Azhari, M., & Pratama, I. N. (2023). ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BMKG PROVINSI MALUKU UTARA STASIUN GEOFISIKA KLAS III TERNATE. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 1(1), 119–128. <https://journaldetubuya.com/index.php/jid/article/view/65/24>
- Kamsina, S., & Khoirudin, R. (2024). Determinan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. *Jurnal Genesis Indonesia*, 3(01), 15–24. <https://doi.org/10.56741/jgi.v3i01.477>
- Nadyawati, L. (2023). Efektivitas Implementasi Aplikasi Simpledesa Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Desa Gili Indah. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 1–18. [file:///C:/Users/ACER/Downloads/EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI APLIKASI SIMPLEDESA.pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/EFEKTIVITAS%20IMPLEMENTASI%20APLIKASI%20SIMPLEDESA.pdf)
- Nurdin. (2023). PERAN E-GOVERNMENT DALAM RELASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 1(1), 63–74. <https://journaldetubuya.com/index.php/jid/article/view/58/17>
- Nurulita, F., Kamaruddin, K., & Asmini, A. (2023). Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 11(2), 261–272. <https://doi.org/10.58406/jeb.v11i2.1314>
- Penduduk, P. J., Pendidikan, T., Tajriah, S., Sagajoka, E., & Djata, B. T. (2024). *Timur Tahun 2013-2022*. 4(1), 1–6.
- Pengangguran, P. T., Ekonomi, P., Kemiskinan, T., & Ntt, D. I. (2023). *Pengaruh tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di ntt*. 20(02), 257–265.
- Pratama, I. N. (2023). *Dinamika Kemiskinan Di Kota Mataram: Analisis Perubahan Tingkat Kemiskinan Dalam Dekade Terakhir*. 2(April), 1216–1222.
- Prayoga, D. A., Hadi, A., & Pratama, I. N. (2023). MODAL SOSIAL MUKTI DALAM

MEMENANGKAN PEMILIHAN KEPALA DESA DUA PERIODE DI DESA POHGADING KECAMATAN PRINGGABAYA. *Jurnal Ilmiah Aset*, 1(1), 19–32. file:///C:/Users/ACER/Downloads/MODAL+SOSIAL+MUKTI+DALAM+MEMENANGKAN+PEMILIHAN+KEPALA+DESA+DUA+PERIODE+DI+DESA+POHGADING+KECAMATAN+PRINGGABAYA+.pdf

Prihatin, H. T., & Pratama, I. N. (2021). Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 1(2), 125. <https://doi.org/10.31764/jgop.v1i2.3962>

Roen, Y. A., Gie, E., & Asal, S. (2024). Implementasi Pelibatan Masyarakat Desa Pukdale Kabupaten Kupang Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(11), 2702–2707. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i11.578>

Token, F. B. (2021). Model Pemberdayaan Perempuan Single Parent Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur. *Warta Governare: Jurnal Pemerintahan*, 2(2), 288–310.

Triani, Y., Panorama, M., & Sumantri, R. (2020). Analisis Pengentasan Kemiskinan Di Kota Palembang. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 158. <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.635>